

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Goal Congruence*

Goal congruence berasal dari dua kata, goal yang berarti tujuan dan *congruence* yang berarti keselarasan, maka istilah *goal congruence* merujuk pada pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memungkinkan terjadinya konflik tujuan, pada titik inilah *goal congruence* semakin penting. Dalam organisasi banyak pihak yang saling bekerjasama, misalnya antara karyawan dan pengusaha atau antara manajer dan karyawan atau pihak-pihak yang bekerjasama dalam bisnis. (Hanif, 2022).

Organisasi adalah kumpulan orang yang bekerjasama untuk mewujudkan tujuan. Namun, setiap individu yang bekerja dalam organisasi juga memiliki tujuannya sendiri, yang belum tentu sejalan dengan tujuan organisasi. Ada potensi terjadi konflik tujuan, antara tujuan organisasi dan tujuan individu (Hanif, 2022).

Goal congruence merupakan pencapaian tujuan organisasi, keselarasan tujuan, atau keselarasan tujuan, didefinisikan sebagai penyelarasan tindakan individu untuk mencapai tujuan pribadi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini berarti bahwa organisasi akan meninjau seluruh operasi dan aktivitas untuk memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka (orang, operasi dan aktivitas) yang

beroperasi dengan cara yang membatasi atau menghalangi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya, apapun bentuknya (Majid, 2019).

2.1.2. Tinjauan *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat digunakan sebagai istilah lain. Menurut World Bank, *good governance* adalah jenis pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang mematuhi pasar yang efektif dan demokrasi, menjaga disiplin anggaran, mencegah investasi yang tidak sehat, dan menciptakan dasar hukum dan politik untuk kemajuan demokrasi (Mardiasmo, 2009).

Good governance adalah konsep yang mengacu pada cara pemerintahan atau tata kelola sebuah organisasi, entitas, atau negara dijalankan dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang transparan, akuntabel, efisien, inklusif, berkeadilan, dan berdasarkan hukum (Veno, 2015). Tujuan utama dari *good governance* adalah menciptakan lingkungan di mana kepentingan semua pemangku kepentingan diakui dan dihormati, serta di mana sumber daya dan kekuasaan dikelola dengan baik untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial (Wirasedana, 2021).

Good governance adalah konsep penting dalam pengelolaan pemerintahan dan organisasi di berbagai tingkatan, dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana kebijakan yang baik dapat dibuat, sumber daya dapat dikelola dengan efisien, dan masyarakat dapat mempercayai lembaga-lembaga yang mengatur mereka.

Komponen atau pilar utama yang dapat menunjukkan administrasi umum dengan menunjukkan pengelola yang telah menerapkan peraturan:

a. Aturan terhadap Hukum

Hukum harus adil dan berlaku untuk semua orang, termasuk hak asasi manusia. Supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certitude*), hukum responsip, penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, dan independensi peradilan adalah beberapa karakteristik supremasi hukum..

b. Transparansi

Transparansi berarti akses bebas dan terbuka ke informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga orang yang membutuhkannya dapat dengan mudah mengaksesnya. Informasi juga harus mudah dipahami dan dipantau.

c. Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas dan efisiensi adalah salah satu prinsip good governance yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat.

d. Akuntabilitas

Peran pemerintah adalah bertanggung jawab atas tindakan dan pengaturan yang ditentukannya.

e. Visi yang strategis

Ini adalah visi strategis masa depan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Pemimpin dan pejabat harus mampu memandang masa depan melalui kaca mata pembangunan manusia secara lebih luas dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai pembangunan tersebut. (Rachman, 2021).

Alat-alat ini paling sering digunakan oleh organisasi swasta (komersial) dan juga digunakan oleh organisasi pemerintah. Tata kelola yang baik merupakan tujuan akhir peningkatan kualitas manajemen (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat).

Strategi, prosedur, dan praktik curang (fraud) banyak disebabkan oleh kurangnya kontrol dan pengawasan dari manajemen puncak yang independen oleh perusahaan boards (Takidah & Ferdyant, 2014).

2.1.3. Tinjauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian Pemerintah adalah proses menyeluruh atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau seluruh pegawai untuk menjamin dan mencapai tujuan organisasi dengan kegiatan yang positif dan efektif yang

melaporkan keunggulan, Melindungi barang milik negara dan menghormati peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, komponen pengendalian internal adalah:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Setiap organisasi dituntut untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik agar sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan secara efektif. Penting untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang menghasilkan perilaku positif dan bermanfaat. Pemimpin dan seluruh pegawai pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang mendorong perilaku positif dan mendukung manajemen dan pengendalian internal yang baik. Lingkungan pengendalian mencakup subfaktor:

- a. Penegakan integritas dan etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Struktur organisasi sesuai kebutuhan
- e. Delegasi wewenang dan tanggungjawab

- f. Kebijakan pembinaan sumber daya manusia
- g. Peran APIP yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik

2. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah kegiatan Penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi baik dari luar (Eksternal) maupun dalam (internal). Kegiatan Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. kemudian dilanjutkan dengan aktivitas mengenali dan mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Pengendalian intern harus menilai risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari dalam maupun dari luar. terdiri dari sub unsur :

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka untuk mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang

dilakukan untuk mengatasi resiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi karena mereka memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. terdiri dari sub unsur :

- a. Reviu kinerja
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian system informasi
- d. Pengendalian fisik asset
- e. Penetapan dan reviu indikator
- f. Pemisah fungsi
- g. Otorisasi
- h. Pencatatan
- i. Pembatasan akses
- j. Akuntabilitas
- k. Dokumen system pengendalian intern

4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang dinyatakan. Ini harus dilakukan

dengan tepat waktu dan dalam bentuk dan metode tertentu sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat mengontrol dan bertanggung jawab. Komunikasi terdiri dari sub unsur :

- a. Informasi
- b. Komunikasi efektif

5. Pemantauan

Pemantauan harus memiliki kemampuan untuk menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa saran dari hasil audit dan revidu lainnya dapat ditindaklanjuti dengan cepat. terdiri dari sub unsur:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah

Menurut Mulyadi (2010) “Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, teknik, dan ukuran yang dirancang untuk memastikan kekayaan organisasi. Meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, memastikan keandalan dan ketelitian data akuntansi.”

Menurut Krismiaji (2010) “Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan teknik yang digunakan untuk menyimpan aktiva dan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan.” Pendapat lain dikemukakan Tunggal (2010) “Pengendalian internal adalah tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan staf entitas lain. Ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan yang cukup tentang tiga

tujuan: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang dan diterapkan oleh sebuah organisasi untuk membantu mencapai tujuan operasionalnya dengan efisien dan efektif, serta mencegah atau mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan sumber daya, kesalahan, dan pelanggaran hukum (Sari, 2017).

SPI sering kali menjadi fokus penting bagi perusahaan yang ingin menjaga reputasi mereka, menghindari kerugian finansial, dan memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan (Dhiyavani, 2017). Banyak organisasi mengandalkan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi keefektifan SPI mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

2.1.4. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Elim (2014) menyatakan bahwa manajemen kinerja juga dapat didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan, terencana, dan sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, kaji ulang, dan perbaikan kinerja. Untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, manajemen kinerja adalah proses menentukan indikator kinerja yang tepat untuk suatu kegiatan dan pengukuran indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut (Elim, 2014).

Kemampuan suatu daerah untuk menggunakan dan mengelola kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung operasi sistem pemerintahan dikenal sebagai kinerja pengelolaan keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan, biasanya digunakan rasio-rasio, yang merupakan perbandingan antara beberapa angka dalam laporan keuangan dikalikan dengan 100 persen. Ini menunjukkan hubungan relatif atau proporsi antara dua angka yang digunakan, yang dianggap memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan laporan keuangan pemerintah (Elim, dkk, 2014).

Indikator kinerja pengelolaan keuangan menurut Yusanti (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Perancangan dengan Pelaksanaan: Ini berkaitan dengan sejauh mana rencana dan perancangan keuangan yang telah dibuat dipatuhi dan diimplementasikan dengan benar. Kesesuaian ini mencakup aspek seperti apakah alokasi anggaran sesuai dengan rencana, apakah strategi investasi sesuai dengan tujuan, dan sejauh mana keputusan keuangan dijalankan sesuai dengan rencana.
- b. Kepatuhan terhadap Regulasi: Ini mengukur sejauh mana entitas mematuhi peraturan, hukum, dan regulasi yang berlaku terkait dengan keuangan. Kepatuhan ini penting untuk menghindari risiko hukum dan memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan. Beberapa bidang

regulasi yang mungkin relevan termasuk pajak, laporan keuangan, dan peraturan industri.

- c. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan: Ini melibatkan evaluasi sejauh mana tujuan dan target keuangan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Apakah investasi yang dilakukan menghasilkan hasil yang diharapkan? Apakah anggaran yang dialokasikan untuk berbagai inisiatif menghasilkan manfaat yang diinginkan? Evaluasi efektivitas membantu mengukur dampak nyata dari keputusan dan tindakan keuangan.
- d. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan: Efisiensi mengacu pada sejauh mana entitas dapat mencapai hasil yang maksimal dengan biaya dan sumber daya yang minimal. Dalam konteks keuangan, ini berarti meminimalkan pemborosan, mengelola biaya operasional dengan baik, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Penting untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi kinerja keuangan secara teratur agar entitas dapat membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan dan bisnisnya dengan lebih baik.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan

Keuangan Di Balai Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah” Maka Hipotes yang digunakan:

1. Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Balai Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Goal congruence mengacu pada kesesuaian antara tujuan individu atau kelompok dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok di dalam organisasi memiliki tujuan yang sejalan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan goal congruence karena menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berdasarkan aturan hukum yang baik. Dalam lingkungan tersebut, individu atau kelompok cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang tujuan organisasi, merasa bertanggung jawab untuk mencapainya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan beroperasi dalam kerangka aturan yang jelas. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Semakin tinggi tata kelola instansi yang baik maka kinerja pengelolaan keuangan juga semakin baik, dan begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2021) penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Makassar

dipengaruhi oleh penerapan *good governance* dan pengendalian internal sebesar 58,17% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

H₁: Penerapan *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Balai Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

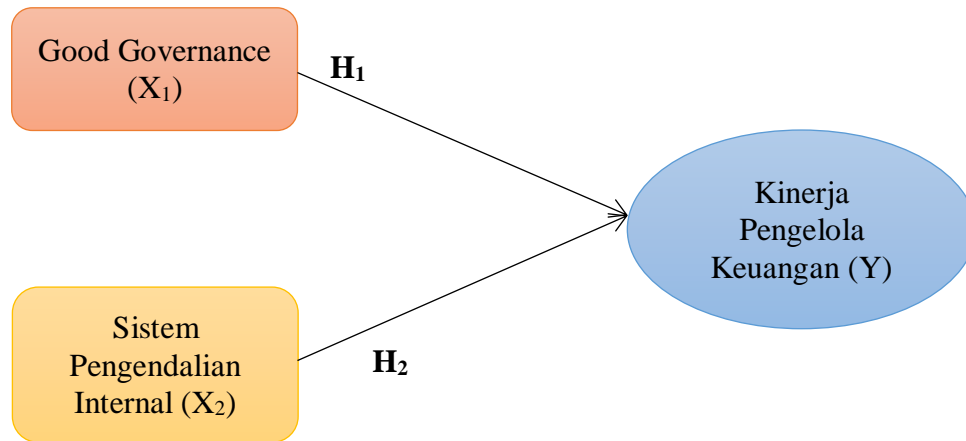
2. Pengaruh sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Balai Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya kepatuhan yang baik, individu atau kelompok dalam organisasi pemerintah akan bekerja sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan keselarasan tujuan karena semua pihak berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirasedana (2021) kualitas sumber daya manusia, *good governance* dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Denpasar memiliki efek positif.

H₂: Sistem Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Balai Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Keterangan:

Good governance mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan. Entitas yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan lebih cenderung untuk memberikan informasi keuangan yang akurat, lengkap, dan mudah diakses. Membantu mengurangi risiko terjadinya praktik keuangan yang meragukan atau penyalahgunaan dana. Prinsip-prinsip *good governance* mempromosikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi. Entitas yang mengadopsi *good governance* akan mengembangkan struktur pengambilan keputusan yang jelas, dengan definisi peran dan tanggung jawab yang jelas. Ini membantu meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana karena adanya mekanisme pemantauan dan pelaporan yang efektif. Dalam rangka mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang baik, implementasi prinsip-prinsip

good governance sangatlah penting. Keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana entitas menjalankan proses pengambilan keputusan dan interaksi dengan stakeholder.

Pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan suatu entitas. Pengendalian internal adalah serangkaian proses, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan akurasi dan keandalan informasi keuangan, mempromosikan efisiensi operasional, serta mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Pengendalian internal membantu melindungi aset entitas dari risiko kecurangan, pencurian, atau kerusakan. Melalui pemisahan tugas dan penerapan langkah-langkah keamanan fisik dan teknologi informasi, pengendalian internal dapat mencegah potensi kerugian keuangan yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan.